

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BPBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan prosedur perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan langkah-langkah dan kebijakan yang responsif terhadap

perubahan yang terjadi baik yang terkait dengan kompleksitas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Selain itu, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Tantangan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan prima mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan untuk mempersiapkan diri untuk eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun secara bertahap yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun berjalan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat visi, misi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Grobogan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- j. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
- p. Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 76).
- r. Peraturan Bupati Grobogan No. 18 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan RENJA BPBD Tahun 2024 dimaksudkan agar dapat menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BPBD Kab. Grobogan adalah :

- 1) Merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada RKPD.
- 2) Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran.
- 3) Menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tupoksinya.
- 4) Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum PD.

1.4 Sistematika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sistematika penulisan Renja sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD 2016 – 2021

Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi ada dua hal yang dapat diidentifikasi, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan perkembangan. Hasil evaluasi sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Grobogan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Grobogan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan BPBD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Grobogan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Grobogan ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024.

Pagu Anggaran yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 23.454.206.628,00 yang terdiri dari 2 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Berikut Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Periode Tahun Anggaran Lalu (Tahun 2022) :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja BPBD Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra BPBD 2021-2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026) Akhir periode renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2023 (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (tahun berjalan/ n-1)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisssi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas								
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	41 dokumen	2 dokumen	-	-	100%	8 dokumen	10 dokumen	24%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu								
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	42 bulan	60%

1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honor bendahara pengeluaran dan pengurus barang	8 orang	-	-	-	-	2 orang	2 orang	25%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Pembayaran honor bendahara pengeluaran dan pengurus barang	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	100%
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	100%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	577 stel	330 stel	138 stel	97 stel	70%	63 stel	487 stel	84%
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 orang	-	40 orang	40 orang	100%	42 orang	82 orang	96%
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang	-	4 orang	4 orang	100%	26 orang	30 orang	93%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1000 unit	223 unit	223 unit	113 unit	100%	200 unit	536 unit	53,6%
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-

1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47625 unit	9882 unit	10350 unit	6983 unit	67,4%	8298 unit	25.163 unit	52%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	412400 unit	44.589 unit	131.747 unit	37.256 unit	28%	116.630 unit	198.475 unit	48%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan	29940 unit	42 item	15 jenis	60 jenis		5193 unit		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7025 kali	1123 kali	2869 kali	2680 kali	93%	2692 kali	6495 kali	92%
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15 unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	33%
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	1 unit	100%
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	1 unit	100%
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87 unit	19 jenis	25 unit	25 unit	100%	3 unit	47 unit	54%
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%

1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	J Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	9 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	41 unit	51%
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 unit	-	-	-	-	35 unit	35 unit	58%
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	46 unit	-	6 unit	4 unit	66%	18 unit	22 unit	47%
1	05	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	12 unit	10 unit	8 unit	80%	-	20 unit	400%
1	05	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 unit	20 unit	1 unit	1 unit	100%	23 unit	44 unit	48%
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	-	1 dok	100%
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	600 orang	-	-	-	-	150 orang	150 orang	25%

						Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya								
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
						Persentase ketersediaan peralatan kesiapsiagaan bencana								
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	-	1 dok	100%
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2240 orang	200 orang	240 orang	240 orang	100%	320 orang	760 orang	33,9%
						Jumlah desa dan kelurahan tangguh bencana yang terbentuk di daerah rawan bencana	14 desa	2 desa	2 desa	2 desa	100%	3 desa	7 desa	50%
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Saprasi kesiapsiagaan terhadap bencana yang tersedia (EWS)	6 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	33%
						Jumlah peserta pelatihan pengoperasian sistem Pusdalops	80 orang		-	-	-	20 orang	20 orang	25%

1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	24 unit	7 unit	-	-	-	6 unit	13 unit	54%
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi kesiapaan kebencanaan antar stakeholder	320 orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	25%
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 orang	-	-	-	-	-	-	0%
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	66%
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2000 orang	200 orang	600 orang	300 orang	50%	400 orang	900 orang	45%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TRC dan petugas pusdalops BPBD Kabupaten Grobogan yang terbayarka	135 orang	26 orang	27 orang	27 orang	100%	27 orang	80 orang	59%
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana yang tertangani	200 orang	40 kejadian	40 kejadian	30 kejadian	75%	40 kejadian	110 kejadian	55%

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana yang terpenuhi	7 jenis	2 jenis	4 jenis	2 jenis	50%	7 jenis	11 jenis	157%
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah pemakaman yang dilakukan secara protokol kesehatan Covid 19	140 kali	-	99 kali	68 kali	68%	-	68 kali	48,5%
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100%
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi forum terpadu penanggulangan bencana	10 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	2 kegiatan	5 kegiatan	50%
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Workshop Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	200 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	25%
						Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang dilakukan	80 kegiatan	17	20 kegiatan	39 kegiatan	195%	10 kegiatan	66 kegiatan	82,5%
						Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Toren/ Penampungan air di Desa Rawan Kekeringan	20 desa	-	-	-	-	5 desa	5 desa	25%
						Jumlah penyediaan sarpras penanggulangan bencana alam	15 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	8 jenis	53%
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi kebencanaan yang dikelola	5 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	40%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. BPBD Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja. Adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. IKU merupakan capaian indikator program per bidang urusan pemerintahan sesuai program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarah pada pencapaian unsur misi ke-2 yaitu : Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana. Tujuan yang ingin diwujudkan yaitu: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana. salah satu indikator dari tujuan tersebut yaitu Indeks Risiko Bencana (IRBI). Sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator Indeks ketahanan Daerah (IKD). Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks Risiko Bencana	V		154,30 (Tinggi)	150 (Tinggi)	145 (Sedang)	140 (Sedang)	115,38 (Sedang)		110 (Sedang)	106 (Sedang)	
Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	V		0,64	0,66	0,68	0,70	0,81		0,84	0,87	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		v	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
		Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif		v	70%	70%	70%	70%	70%		70%	70%	
		Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		v	65%	70%	75%	75%	56%		75%	75%	

2.3 PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

2.3.1 Tingkat Pelayanan BPBD

Secara kelembagaan, BPBD memiliki fungsi sebagai koordinator, komando, dan pelaksana dalam tugas penanggulangan bencana. Tugas tersebut meliputi pra bencana (sebelum terjadinya bencana), saat bencana (saat tanggap darurat), dan pascabencana (masa setelah keadaan darurat bencana belalu). Tugas ini sangat erat kaitannya dengan SKPD teknis, instansi, dan lembaga lainnya. Kompleksitas tugas dan fungsi tersebut akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3.2 Tugas BPBD

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana lainnya yang sah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.3.4 Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

1. Permasalahan Kesekretariatan

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset.

2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Belum semua kerusakan akibat bencana tertangani terutama akibat bencana longsor;
- b. Banyaknya laporan masyarakat terhadap kerusakan akibat bencana;
- c. Keterbatasan APBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, selama ini lebih banyak menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT)
- d. Kurangnya SDM teknis terkait dengan pengkajian akibat bencana;
- e. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana alat berat pendukung penanganan bencana;
- f. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait penanganan pasca bencana.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Kapasitas SDM teknis penanganan kedaruratan bencana yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- c. Belum optimalnya sistem pelaporan penanganan bencana (belum berdasarkan NIK);
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait penanganan kedaruratan;

- e. Belum meratanya penyaluran bansos pada masa tanggap darurat;
- f. Informasi pelaporan bencana dari masyarakat yang kurang akurat, sehingga menyebabkan penyaluran logistik dari masyarakat yang kurang optimal.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Belum optimalnya fungsi relawan bencana;
- b. Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan rawan bencana;
- c. Belum tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, RPP dan Renkon) di tingkat Kabupaten hingga tingkat Kelurahan yang berketetapan hukum.
- d. Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum optimal.
- e) Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan pada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana:
- e. Belum semua desa rawan bencana terbentuk desa tangguh bencana;
- f. Belum tersosialisasinya sekolah aman bencana ;
- g. Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

2.3.1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu- isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja BPBD Kabupaten Grobogan yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen perangkat daerah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait penanganan pasca bencana;
4. Belum optimalnya penyampaian informasi daerah rawan bencana kepada masyarakat ;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, hal ini bias dilihat dari persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat belum maksimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 bahwa BPBD Kabupaten Grobogan bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait penanganan Bencana di Kabupaten Grobogan.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada BPBD Kabupaten Grobogan telah diakomodir. Untuk kondisi Anggaran Tahun 2024 telah sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ke depannya tidak terjadi lagi refocusing.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4
Review terhadap rancangan awal RKPD BPBD Kab. Grobogan Tahun 2024

Rancangan awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan						
NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				a.Laporan Keuangan sesuai SAP b.Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah c.Prosentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	100 % 100% 100%	5.607.011.250	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				a.Laporan Keuangan sesuai SAP b.Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah c.Prosentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	a.100 % b.100% c.100%	5.607.011.250
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	20.000.000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	20.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	8 dokumen	20.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	8 dokumen	20.000.000
		Administrasi Keuangan		Kab. Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.156.839.000		Administrasi Keuangan		Kab. Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.156.839.000
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	3.137.759.000			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	3.137.759.000

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran honor bendahara pengeluaran dan pengurus barang	2 Dokumen	19.080.000			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran honor bendahara pengeluaran dan pengurus barang	2 Dokumen	19.080.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	345.149.600		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	345.149.600
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 Paket	80.149.600			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 Paket	80.149.600
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	215.000.000			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	215.000.000
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	50.000.000			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	50.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	100 %	1.144.440.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Grobogan		100 %	1.144.440.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
			Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	414.440.000			Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	414.440.000

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	80.000.000			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	80.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	10.000.000			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	10.000.000
			Penyediaan bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	110.000.000			Penyediaan bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	110.000.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1350 Laporan	500.000.000			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1350 Laporan	500.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Grobogan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	75.197.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Grobogan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	75.197.000
			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.000.000			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	70.197.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	70.197.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Kab. Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	337.295.650		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Kab. Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	337.295.650
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.485.650			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.485.650
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.810.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	150.810.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Grobogan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %	528.090.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Grobogan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %	528.090.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	355.020.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	355.020.000
			Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel terpelihara	20 unit	3.300.000			Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel terpelihara	20 unit	3.300.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 unit	19.770.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 unit	19.770.000

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	20 unit	50.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	20 unit	50.000.000
2	Program Penanggulangan Bencana				a. Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat b. Persentase kelompok relawan bencana yang aktif c. Cakupan desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	a.100 % b. 70 % c. 75 %	8.769.438.900	Program Penanggulan Bencana				a. Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat b. Persentase kelompok relawan bencana yang aktif c. Cakupan desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	a.100 % b. 70 % c. 75 %	8.769.438.900
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		Kab. Grobogan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	127.025.000		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		Kab. Grobogan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	127.025.000

			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1150 Orang	127.025.000			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1150 Orang	127.025.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kab. Grobogan	a. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana b. Persentase ketersediaan peralatan kesiapsiagaan bencana	a. 100 % b. 70%	771.077.900		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kab. Grobogan	a. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana b. Persentase ketersediaan peralatan kesiapsiagaan bencana	a. 100 % b. 70%	771.077.900
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	560 Orang	282.000.000			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	560 Orang	282.000.000
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 Dok	191.000.000			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 Dok	191.000.000

			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	16 Unit	54.751.000			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	16 Unit	54.751.000
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	50.000.000			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	50.000.000
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	40.000.000			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	40.000.000
			Penyusunan Rencana Kontinjensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	76.500.000			Penyusunan Rencana Kontinjensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	76.500.000
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	76.826.900			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	76.826.900
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Grobogan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.259.524.000		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Grobogan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.259.524.000
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dok	739.125.000			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dok	739.125.000

			Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	40 Orang	34.944.000			Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	40 Orang	34.944.000
			Penyediaan Logistik Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Korban Bencana Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	327 Orang	485.455.000			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban Bencana Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	327 Orang	485.455.000
		Penataan sistem Dasar Penanggulang an Bencana		Kab. Grobogan	a. Persentase jumlah desa yang dapat dipantau sesuai resiko bencana yang dimiliki b. Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a 100% b. 56%	6.711.238.510		Penataan sistem Dasar Penanggulang an Bencana		Kab. Grobogan	a. Persentase jumlah desa yang dapat dipantau sesuai resiko bencana yang dimiliki b. Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a 100% b. 56%	6.711.238.510
			Penyusun an Regulasi Penanggula ngan Bencana Kabupaten / Kota		a. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun b. Jumlah dokumen RPKB tersusun	-	-			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana		a. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun b. Jumlah dokumen RPKB tersusun	-	-
			Penguatan Kelembaga an Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok	28.360.000			Penguatan Kelembagaan Bencana		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	28.360.000
			Pengelolaan dan Pemanfaata n Sistem Informasi Kebencana an		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok	10.000.000			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok	10.000.000

			Penangan n Pasca Bencana Kabupaten / Kota		a. Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 dok	6.672.878.510			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota		a. Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 dok	6.672.878.510
--	--	--	---	--	---	-------	---------------	--	--	--	--	---	-------	---------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPBD diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya pada Musrenbang tingkat Tahun 2024. Program dan kegiatan SKPD yang sifatnya normatif, terkait tugasnya sebagai pelayanan bagi perangkat daerah meliputi 2 Program yang tercantung dalam tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Grobogan

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4		5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				a.Laporan Keuangan sesuai SAP b.Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah c.Prosentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	100 %
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	8 dokumen
		Administrasi Keuangan		Kab. Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran honor bendahara pengeluaran dan pengurus barang	2 Dokumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 Paket
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang

			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	100 %
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen
			Penyediaan bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1350 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Grobogan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %
			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Kab. Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Grobogan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit
			Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel terpelihara	20 unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 unit
			Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/ terpelihara	20 unit
2	Program Penanggulangan Bencana				a. Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat b. Persentase kelompok relawan bencana yang aktif c. Cakupan desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	a.100 % b. 70 % c. 75 %
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		Kab. Grobogan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1150 Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kab. Grobogan	a. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana b. Persentase ketersediaan peralatan kesiapsiagaan bencana	a. 100 % b. 70%
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	560 Orang

			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 Dok
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	16 Unit
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang
			Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Grobogan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dok
			Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	40 Orang
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Korban Bencana Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	327 Orang
		Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Kab. Grobogan	a. Persentase jumlah desa yang dapat dipantau sesuai resiko bencana yang dimiliki b. Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a 100% b. 56%
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota		a. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun b. Jumlah dokumen RPKB tersusun	-

			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota		a. Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 dok

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra Kementerian/Lembaga, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

***"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong"***

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024 adalah:

***"BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh
bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong"***

RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.

Dari konstruksi perencanaan pembangunan nasional ini terlihat bahwa urusan pengelolaan kebencanaan (penanggulangan bencana) merupakan salah satu sub agenda strategis pembangunan nasional dalam menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif demi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya meminimalisasi risiko bencana dengan sasaran penurunan indeks risiko bencana pada pusatpusat pertumbuhan yang beriko tinggi.

Upaya pengelolaan bencana untuk mengurangi risiko bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) langkah secara simultan yakni:

- 1) Internalisasi upaya mitigasi bencana dalam peraturan perundang – undangan nasional dan daerah;
- 2) Menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui peningkatan *civil society awareness* dan kepedulian dunia usaha;
- 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana.

Selanjutnya tiga langkah srategi tersebut agar dapat direalisasikan secara terencana dan terukur selanjutnya akan diaplikasikan secara konkret dalam bentuk program dan kegiatan dari satuan kerja pelaksana penanggulangan bencana baik di tingkat nasional dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun di tingkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perumusan program dan kegiatan ini pada tingkat daerah juga harus mengacu kepada RPJMD yang berlaku agar selaras dengan visi misi dan program prioritas dari Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Grobogan

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan secara umum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang kebencanaan hal ini dapat dilihat di Tabel 3. 2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kapasitas dan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Hitungan dari BNPB dengan 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah terdapat 7 prioritas dan 71 indikator	indeks	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72
	Meningkatnya kualitas pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan kebencanaan sesuai standar (rata-rata capaian SPM bencana)	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi Rawan Bencana + Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana + Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dibagi 3	%	tad	tad	100	100	100	100	100
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban yang dilakukan evakuasi / jumlah korban terdampak x 100 %	%	tad	tad	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa dan kelurahan tangguh bencana yang dibentuk / jumlah desa dan kelurahan rawan bencana dikali 100	%	2,31	5,38	6,92	9,23	11,54	13,85	16,15
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Nilai	62,41 (B)	NA	65 (B)	68 (B)	70 (BB)	72 (BB)	73,5 (BB)
	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM OPD	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Nilai	NA	NA	76,70 (B)	77,20 (B)	77,70 (B)	78,70 (B)	79,70 (B)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.3 Program dan Kegiatan

Kedudukan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari rencana kerja jangka menengah. Program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 untuk rencana tahun 2024.

Adapun keterkaitan program/kegiatan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 dengan RPJMD tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Program Kegiatan BPBD Kabupaten Grobogan

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan	
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan bahan logistik kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan bahan/material
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penanggulangan Bencana		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	

			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
			Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Untuk Prakiraan maju berdasarkan renstra BPBD Kab. Grobogan Tahun 2021-2026.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan oleh BPBD Kabupaten Grobogan. Ada 2 Program, 11 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan pada BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 14.678.748.460,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan - Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Ket	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				14.678.748.460				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.678.748.460				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.678.748.460				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				8.868.865.410			100%	4.837.868.031
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				127.025.000				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1150 Orang	127.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1150 Orang	127.025.000
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota				127.025.000				
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				771.077.900				630.500.000
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	560 Orang	282.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		680 orang	318.000.000
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				104.022.400				
					Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)				177.977.600				

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	2 Dokumen	191.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	97.500.000
					Pengadaan Early Warning System (EWS)				191.000.000			
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	16 Unit	54.751.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	50.000.000
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				54.751.000			
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000
					Pengelolaan Risiko Bencana				50.000.000			
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	30 Orang	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	40.000.000
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)				40.000.000			
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1 Dokumen	76.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-
					Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)				76.500.000			
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	400 Orang	76.826.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 Orang	75.000.000
					Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)				14.324.700			

					Apel Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				12.500.000				
					Jambore Relawan Bencana				50.002.200				
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.259.524.000			100%	1.024.125.000
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	2 Dokumen	739.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	739.125.000
					Respon Cepat Darurat Bencana (Tenaga Harian Lepas SAR BPBD)				739.125.000				
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	40 Orang	34.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	35.000.000
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Operasional SAR)				34.944.000				
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	327 Orang	485.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		327 Orang	250.000.000
					Pengadaan Logistik Bahan Makanan				114.754.000				
					Pengadaan Logistik Sandang				95.310.000				
					Pengadaan Logistik Bahan Bangunan				174.055.000				
					Pengadaan Air Bersih				101.336.000				
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				6.711.238.510				
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1 Dokumen	28.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.000.000
					Forum Terpadu Penanggulangan Bencana				28.360.000				
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) - SIGANA				10.000.000				

1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	2 Dokumen	6.672.878.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.021.218.031
					Rekonstruksi Desa Kronggen Kecamatan Brati				187.684.800				
					Penanganan Longsor Talud Jembatan Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus				193.290.400				
					Penanganan Longsor Jembatan Desa Putatsari Kec. Grobogan				187.684.800				
					Rekonstruksi Jembatan Desa Sedayu Kecamatan Grobogan				187.684.800				
					Rehabilitasi Jembatan Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo				187.684.800				
					Penanganan Longsor Desa Karang Sari Kecamatan Brati				193.290.400				
					Penanganan Longsor Tebing Sungai Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari				193.290.400				
					Penanganan Longsor Desa Kenteng Kecamatan Toroh				193.290.400				
					Penanganan Longsor Dusun Guyangan Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan				193.290.400				
					Penanganan Longsor Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon				175.964.000				
					Penanganan Longsor Desa Bangsri Kecamatan Geyer				193.290.400				
					Penanganan Longsor Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi				193.290.400				
					Penanganan Longsor Dusun Kalianjang Desa Deras Kecamatan Kedungjati				175.964.000				
					Penanganan Longsor Tebing Sungai Desa Mlowokarantalun Kecamatan Pulokulon				184.627.200				
					Penanganan Longsor Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari				158.637.600				
					Penanganan Longsor Desa Kronggen Kecamatan Brati				184.627.200				
					Penanganan Longsor Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan				193.290.400				
					Penanganan Longsor Tebing Sungai Dusun Metuk Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati				175.964.000				
					Penanganan Longsor Dusun Pulorejo Desa Kalisari Kecamatan Kradenan				193.290.400				
					Penanganan Longsor Dusun Tepus Desa Dapurno Kecamatan Kradenan				175.964.000				
					Penanggulungan Tanah Longsor Dusun Semutan Kecamatan Pulokulon				193.290.400				
					Rekonstruksi Jembatan Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan				795.514.600				
					Penanganan Longsor Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh				193.290.400				
					Penanganan Longsor Desa Depok Kecamatan Toroh				193.290.400				
					Penanganan Longsor Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer				193.290.400				
					Penanganan Longsor Dusun Ngasem Desa Depok Kecamatan Toroh				193.290.400				

					Penanganan Longsoran Jalan Poros Desa Kedungjati - Dusun Pepe Desa Prigi Kecamatan Kedungjati		193.290.400				
					Pengadaan Kawat Bronjong		199.985.000				
					Pengadaan Batu Belah		199.820.000				
					Pengadaan Kasang / Karung		99.995.200				
					Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana		71.000.000				
					Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)		325.294.000				
					Sewa Excavator		99.426.510				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.809.883.050				4.506.541.912,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	8 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	80.000.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.000.000				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.156.839.000				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang/bulan	3.137.759.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	24 Orang/bulan	2.679.212.550
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.137.759.000				
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	2 Dokumen	19.080.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	13.272.000
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		19.080.000				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		403.965.600			100%	84.000.000
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	128 Paket	138.965.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	180	54.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		138.965.600				
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	10 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	6 orang	30.000.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50.000.000				

1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	40 Orang	215.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	-
					Bimbingan Teknis Dasar Manajemen Bencana				215.000.000			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.194.440.000		100%	985.000.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	2 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 paket	10.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000			
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 paket	20.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor				20.000.000			
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	4 Paket	414.440.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	4 Paket	220.000.000
					Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat (Pelatihan, Kegiatan-Kegiatan dan Jambore)				256.000.000			
					Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dan Jamuan Tamu				91.440.000			
					Penyediaan Makan dan Minum Penanganan Bencana				45.000.000			
					Penyediaan Makan dan Minum Sarasehan Relawan Bencana				22.000.000			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	3 Paket	80.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	3 paket	85.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				80.000.000			
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	4 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	10.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000			
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	2 Paket	110.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Paket	115.000.000
					Penyediaan Bahan/Material (Alat-Alat Tulis Kantor)				110.000.000			

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	1350 Laporan	550.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1350 Laporan	525.000.000
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah				200.000.000				
					Perjalanan Dinas Luar Daerah				350.000.000				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.691.800			100%	55.000.000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	5 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		5 Unit	5.000.000
					Pengadaan Mebel				5.000.000				
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	10 Unit	74.691.800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		8 unit	50.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				74.691.800				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				337.295.650			100%	310.000.000
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	12 Laporan	141.485.650	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	130.000.000
					Penyediaan Jasa Langganan Air				15.721.650				
					Penyediaan Jasa Langganan Listrik				95.764.000				
					Penyediaan Jasa Langganan Telepon				5.000.000				
					Penyediaan Jasa Langganan Internet				25.000.000				

1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	12 Laporan	35.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	40.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	12 Laporan	150.810.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Laporan	130.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.810.000				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				617.651.000			100%	300.057.362
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	16 Unit	444.581.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		16 Unit	125.000.000
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				194.600.000				
					Biaya Transportasi (Bahan Bakar Minyak) Perjalanan Dinas				249.981.000				
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	20 Unit	3.300.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		10 unit	5.057.362
					Pemeliharaan Mebel				3.300.000				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	10 Unit	19.770.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		10 Unit	30.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.770.000				

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	4 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		4 Unit	100.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000				
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	20 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		15 Unit	40.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000				
TOTAL									14.678.748.460				9.344.409.943

BAB V


P E N U T U P

Rencana Kerja ini merupakan alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan maupun sub kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program atau antar program, dengan tetap memperhatikan pokok, tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan indikatif, sehingga pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kondisi, peraturan, dan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran BPBD Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Purwodadi, Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN


ENDANG SULISTYONINGSIH, ST., MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19730726 199803 2 006